

## **PENGARUH PAD TERHADAP PDRB DAN BELANJA MODAL KABUPATEN/ KOTA DI PROVINSI BALI**

**Eko Hariyadi**

**I Nyoman Mahaendra Yasa**

Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana

### **ABSTRAK**

Peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat digunakan sebagai parameter utama dalam mengukur prestasi pembangunan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi adalah meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil yang berasal dari dalam daerah. Pemerintah Daerah berwenang mendayagunakan potensi keuangan daerah dalam wadah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai wujud desentralisasi. Selain PAD, pengeluaran daerah juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah belanja modal. Penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas yaitu PAD memiliki pengaruh terhadap PDRB dan Belanja Modal. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, yang selanjutnya dianalisis dengan metode analisis linier berganda dengan variabel intervening. Hasil penelitian menunjukkan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal dan PDRB, belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB, dan PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB melalui belanja modal.

*Kata Kunci : PAD, PDRB, dan belanja modal*

### **ABSTRACT**

One of the main indicators to measure the performance of regional economic development is the growth rate. Economic growth is the increase in Gross Domestic Product (GDP) of real continuous sourced from within the region. Local Government authorities to leverage the potential of local finance in local revenue as a form of decentralization. In addition to local revenue, the expenditure also affect economic growth. Spending the area in question in this research is capital expenditure. This research was conducted to determine whether the independent variable is local revenues have an impact on Gross Domestic Product (GDP) and capital expenditures. The data use in this research is a secondary data that obtained from the Central Statistics Agency of Bali, which is and then analyzed with multiple linear analysis method of intervening variables. The results showed a positive and significant effect of local revenue on capital expenditures and (GDP), capital expenditures no significant effect on GDP, and local revenue has no significant effect on GDP through capital expenditures.

*Keywords: local revenue, GDP, and capital expenditures*

### **PENDAHULUAN**

Pembangunan ekonomi daerah pada dasarnya adalah sekumpulan aktivitas pemerintah daerah bersama-sama dengan masyarakatnya dalam mengatur dan menggunakan sumber daya yang ada secara intensif untuk mendorong kemajuan ekonomi daerah dengan tujuan menaikkan taraf hidup masyarakatnya (Lukman dan Ghozali, 2011). Kegiatan ekonomi tercermin dari peningkatan pertumbuhan ekonomi (Sufyeti, 2012). Peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat digunakan sebagai parameter utama dalam mengukur prestasi pembangunan ekonomi daerah.

---

**email: eko.hryd@gmail.com/ telpn: +6285 738 117 234**

Menurut Putro (Panji dan Dwirandra, 2014) pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai hasil dari meningkatnya permintaan akan barang dan jasa yang tampak dari besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Firdaus (2013) menyatakan PDRB merupakan total nilai tambah (*value added*) yang dihasilkan oleh keseluruhan aktivitas ekonomi suatu wilayah (*region*) dalam waktu tertentu. Peningkatan PDRB disebabkan oleh meningkatnya produksi barang dan jasa (Silvia,dkk., 2013).

Menurut Oates (1993), tanggung jawab yang lebih besar untuk pemerintah daerah dipandang oleh banyak orang sebagai cara untuk memecahkan perencanaan pusat yang membingungkan, serta sebagai upaya untuk mengatur suatu program pertumbuhan yang mandiri. Kebijakan tersebut memberikan peluang Pemerintahan Daerah di Indonesia untuk meningkatkan kapasitas fiskalnya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah dengan menggali sumber daya potensial yang dimiliki. Pemerintah Daerah berwenang untuk mendayagunakan potensi keuangan daerah dalam wadah PAD sebagai wujud desentralisasi. Oleh sebab itu, pemerintah harus memiliki tata pemerintahan yang baik agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Cooray, 2009).

Kemampuan keuangan daerah yang baik dan sedikit ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana perimbangan pemerintah pusat merupakan ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi. Menurut Zhouhaier (2012) iklim yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi dapat timbul atas pemberian otonomi daerah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lin dan Liu (2000) menunjukkan pemberian otonomi daerah memberikan dampak yang sangat berarti bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat mengeksplorasi PAD agar dapat menjadi prioritas sumber keuangan daerah. Olatunji, dkk. (2009) menjelaskan bahwa pajak daerah merupakan prioritas pendapatan pemerintah daerah, namun selain pajak daerah sumber lain juga berpotensi untuk meningkatkan pendapatan pemerintah daerah.

Puji (2008) menyatakan bersumber pada sudut pandang otonomi, desentralisasi fiskal memperlihatkan peningkatan pertumbuhan ekonomi bagi beberapa provinsi di Indonesia, sehingga dampak diberlakukannya desentralisasi fiskal turut dirasakan oleh Bali sebagai salah satu provinsi di Indonesia. Ikeji (2011) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal akan merangsang pertumbuhan ekonomi di sebuah daerah. Provinsi Bali terbagi atas daerah-daerah kabupaten dan kota yang memiliki karakteristik masing-masing dan potensi yang berbeda-beda, sehingga berdampak pada pendapatan ataupun pengeluaran yang terjadi pada daerah tersebut.

Pendapatan pemerintah daerah erat kaitannya dengan pengeluaran pemerintah daerah (Liliana, dkk., 2011). Menurut Ilukayode (Inuwa, 2012) perangkat penting dalam mengendalikan perekonomian adalah dengan mengalokasikan pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah belanja modal. Taksiran belanja modal (*capital expenditure*) dimaksudkan demi memperoleh aktiva tetap pemerintah daerah untuk menunaikan kepentingan publik (Denni, 2012). Menurut Lin (Achmad, 2009) pertumbuhan yang bertaraf tinggi dapat tercapai dengan pengeluaran pemerintah pada taraf yang tinggi juga.

Menurut Wahyuni (Sudewi dan Wirathi, 2013) untuk menaksir kemampuan keuangan daerah dapat dilakukan dengan menghitung proporsi PAD terhadap TPD kemudian mengukurnya dengan skala interval derajat desentralisasi fiskal. Derajat Desentralisasi Fiskal dapat digunakan untuk menaksir Kemampuan keuangan daerah. Dwirandra (2006) dalam penelitiannya menemukan kemampuan fiskal kabupaten/kota di Provinsi Bali berada dalam katagori sangat rendah. Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa pada era desentralisasi fiskal, pemerintah daerah masih sangat bergantung pada pemerintah pusat. Fenomena yang ada menunjukkan bahwa dengan desentralisasi fiskal, daerah masih belum

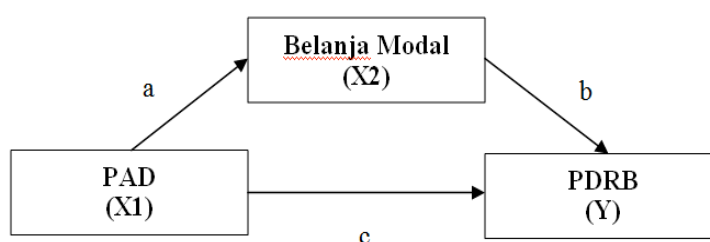
memiliki kemampuan dalam mengatasi kesejangan pendapatan sebagai usaha membiayai pengeluaran daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Bali. Dipilihnya lokasi ini, karena fenomena yang ada menunjukkan bahwa terjadi disparitas antar kabupaten/kota di Provinsi Bali. Objek penelitian ini adalah PDRB, PAD dan Belanja Modal pada kabupaten/kota di Provinsi Bali. Penelitian ini menggunakan data yang tersaji dalam bentuk tabulasi yang didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali. Data tersebut berupa data PAD, PDRB dan belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2008- 2012 yang diukur dalam milyaran rupiah.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis jalur (*path analysis*). Berikut adalah gambar diagram jalur pada penelitian ini:

**Gambar 1 Diagram Jalur Penelitian**



Keterangan :

$X_1$  = variabel eksogen Pendapatan Asli Daerah (PAD)

$X_2$  = variabel intervening Belanja Modal

$Y$  = variabel endogen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

$a, b, c,$  = koefisien regresi untuk masing-masing variabel  $X$

$e_1, e_2$  = Nilai kekeliruan taksiran standar

Pengaruh langsung PAD ( $X_1$ ) terhadap Belanja Modal ( $X_2$ ) ditunjukkan oleh koefisien jalur  $a$ . Pengaruh langsung belanja modal ( $X_2$ ) terhadap PDRB ( $Y$ ) ditunjukkan dengan koefisien jalur  $b$ . Pengaruh langsung PAD ( $X_1$ ) terhadap PDRB ( $Y$ ) ditunjukkan dengan  $c$ . Pengaruh tidak langsung PAD terhadap Belanja modal terhadap PDRB diperoleh dengan mengalikan pengaruh langsung dan tidak langsung atau yang dikenal dengan pengujian variabel mediasi atau Uji Sobel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis jalur disebut juga analisis linier berganda dengan variabel intervening yang berfungsi untuk menaksirkan hubungan kausalitas antar variabel yang berjenjang berdasarkan teori (Suyana Utama, 2012). Hasil pengujian hubungan langsung antar variabel dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1.1 Ringkasan Hasil Regresi**

| Variabel                                       | Koefisien | Signifikansi | $H_0$    |
|--|-----------|--------------|----------|
| PAD ( $X_1$ ) terhadap Belanja Modal ( $X_2$ ) | 0,764     | 0,000        | ditolak  |
| Belanja Modal ( $X_2$ ) terhadap PDRB ( $Y$ )  | -0,056    | 0,669        | diterima |
| PAD ( $X_1$ ) terhadap PDRB ( $Y$ )            | 0,789     | 0,000        | ditolak  |

Tabel 1.1 merupakan ringkasan hasil regresi yang menjelaskan mengenai hubungan antar variabel. Hubungan antar variabel ditunjukkan oleh kolom pertama, kolom kedua memaparkan koefisien jalur yang ditunjukkan oleh *Standardized Coefficient* atau nilai *Beta*, sementara itu kolom ketiga menjelaskan nilai sig., dan kolom terakhir memaparkan mengenai

penolakan dan penerimaan hipotesis. Berdasarkan tabel 1.1 secara rinci dapat dijelaskan hubungan antar variabel sebagai berikut.

### **Pengaruh PAD terhadap Belanja Modal**

Hasil pengujian statistik dengan SPSS menunjukkan tingkat signifikansi pendapatan asli daerah sebesar  $0,000 < 0,05$  sehingga membuktikan belanja modal dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh PAD. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Darwanto dan Yustikasari (2007), Tuasikal (2008) serta Panji dan Dwirandra (2014) dimana pendapatan asli daerah memiliki kolerasi yang positif dan signifikan terhadap belanja modal, dengan demikian hipotesis pertama berhasil didukung. Hal ini mengindikasikan salah satu faktor meningkatnya belanja modal sangat ditentukan oleh besarnya PAD. Semakin tinggi PAD maka pengeluaran pemerintah akan belanja modal pun akan semakin tinggi. Artinya, Pengalokasian belanja modal dalam RAPBD hendaknya dengan memperhatikan penerimaan PAD dan penyesuaian potensi daerah.

Besar kecilnya PAD menentukan besar kecilnya belanja modal, sehingga Pemerintah daerah harus berusaha keras untuk menggali sumber sumber PAD yang jika ingin meningkatkan belanja publik dan kesejahteraan masyarakatnya melalui peningkatan belanja modal. Jadi pengeluaran belanja modal dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah yang dimiliki, meningkatnya belanja modal sebagai cermin meningkatnya PAD. Penelitian ini membuktikan bahwa kabupaten/kota di Provinsi Bali dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahannya telah memiliki kemampuan yang cukup besar dalam membiayai belanjanya, khususnya belanja modal.

### **Pengaruh Belanja Modal terhadap PDRB**

Hasil analisis memperoleh nilai sig. variabel belanja modal sebesar  $0,669 > 0,05$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Hal ini memiliki arti bahwa variabel belanja modal tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PDRB. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Fitriyanti dan Pratolo (2007), Muharni (2008) serta Muhammad dan Alfian (2010) bahwa belanja modal tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PDRB. Dengan kata lain, hipotesis ini tidak mendapat dukungan empiris.

Periode penelitian ini hanya mencakup lima tahun (2008 – 2012) sehingga dimungkinkan kurang untuk melakukan generalisasi atas penelitian ini. Temuan ini juga mengindikasikan bahwa tidak semua belanja modal memberikan efek pada pelayanan publik. Belanja modal yang mengalami kenaikan setiap tahunnya belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap PDRB. Hal ini karena besarnya alokasi belanja langsung yang konsumtif dengan belanja tidak langsung untuk kepentingan publik yang tidak berimbang, sehingga tingginya belanja modal yang diharapkan belum mampu menaikkan PDRB pada kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Pelayanan publik tidak selalu dapat dihubungkan dengan belanja modal. Belanja modal dalam bentuk bangunan beberapa diantaranya justru dinikmati seutuhnya oleh pegawai pemerintah yang tidak memiliki signifikansi terhadap fungsi pelayanan publik. Idealnya alokasi belanja modal dibuat untuk menghasilkan aset tetap milik pemerintah daerah yang memiliki signifikansi terhadap fungsi pelayanan publik. Realitas yang ada menunjukkan realisasi anggaran belanja modal pemerintah memiliki kecenderungan tawar menawar oleh para pembuat keputusan anggaran (*budget actors*).

Pemeliharaan terhadap aset tetap dan biaya operasional pemerintah perlu mendapatkan perhatian khusus. Hal ini diperlukan agar keputusan yang dibuat oleh pemerintah tidak mengorbankan alokasi anggaran sektor lain (*trade-off*) dengan alasan untuk memperoleh kualitas yang berbeda pada sektor yang dikorbankan. Kebijakan yang tidak maksimal terkadang sebagai bentuk konsekuensi dari *trade off* yang besar.

### Pengaruh PAD terhadap PDRB

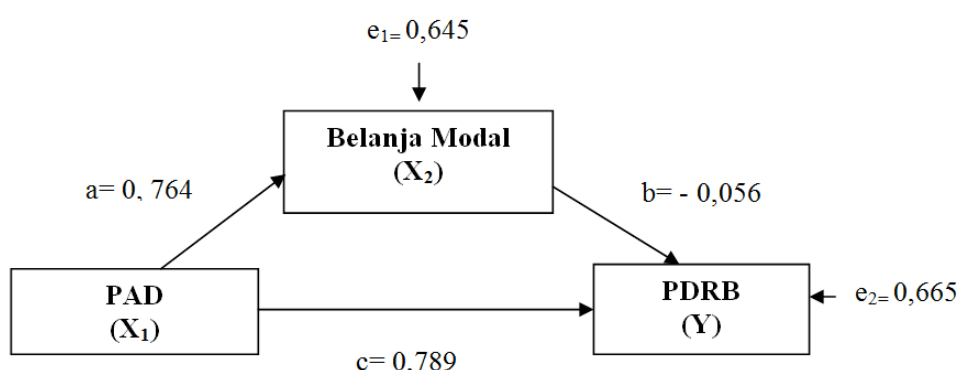
Dari hasil perhitungan didapatkan perbandingan nilai sig. variabel PAD sebesar  $0,000 < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Artinya variabel pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang signifikan PDRB, nilai *beta* pada *standardize coefficient* sebesar 0,718 sehingga berpengaruh positif. Pengaruh PAD terhadap PDRB pada kabupaten/kota di Provinsi Bali dalam kurun waktu 2008 – 2012 yang cukup signifikan berarti kemampuan pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi daerah terlihat cukup baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Ulfi dan Endrawati (2010) serta Setiyawati dan Hamzah (2007) yang menyatakan bahwa PAD mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan melihat hasil analisis elastisitas PAD terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Program pembangunan dan aktivitas daerah sangat ditentukan oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pelaksanaan pembangunan daerah memiliki prinsip kemandirian yang tercermin dari kemampuan fiskal suatu daerah dalam hal pembiayaan. Optimalisasi kemampuan fiskal pemerintah daerah dapat dilakukan dengan cara mengeksplorasi sumber dana yang menjadi potensi daerah.

### Pengujian variabel mediasi

Pengaruh tidak langsung dapat dihitung dengan uji sobel. Pengaruh tidak langsung yang dimiliki model penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2 Diagram Jalur Hasil Penelitian



Berdasarkan diagram jalur pengaruh tidak langsung tersebut, maka besarnya standar error tidak langsung (*indirect effect*)  $S_{ab}$  dihitung dengan rumus berikut ini:

$$S_{ab} = \sqrt{b^2 S_a^2 + a^2 S_b^2}$$

Keterangan :

$S_{ab}$  = besarnya standar error tidak langsung

$S_a$  = standar error koefisien a

$S_b$  = standar error koefisien b

a = jalur  $X_1$  terhadap  $X_2$

b = jalur  $X_2$  terhadap Y

$$S_{ab} = \sqrt{(-0,056^2)0,645^2 + (0,764^2)0,665^2}$$

$$S_{ab} = 0,509$$

Signifikansi pengaruh tidak langsung dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$z = \frac{ab}{S_{ab}}$$

Keterangan :

$S_{ab}$  = besarnya standar error tidak langsung

$$\begin{aligned} ab &= \text{jalur } X_1 \text{ terhadap } X_2 \text{ (a) dengan jalur } X_2 \text{ terhadap } Y \text{ (b)} \\ z &= \frac{(0,764)(-0,056)}{0,509} \\ z &= -0,084 \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan didapatkan perbandingan nilai  $z$  hitung sebesar  $-0,084 < z$  tabel sebesar 1,96, maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Artinya PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB melalui Belanja Modal pada kabupaten/kota di Provinsi Bali. Dengan demikian hubungan tidak langsung ini yang dituangkan dalam hipotesis keempat tidak mendapat dukungan empiris. Variabel yang mempengaruhi PDRB yang diteliti hanya pendapatan asli daerah dan belanja modal, sehingga nilai *adjusted Rsquare* hanya sebesar 0.556, ini artinya model dapat menjelaskan variasi PDRB hanya sebesar 55,8 persen sedangkan sisanya 44,2 persen dijelaskan oleh faktor lain diluar model, sehingga variabel yang digunakan dalam penelitian yang akan datang diharapkan lebih lengkap dan lebih bervariasi yang diperkirakan berpengaruh terhadap PDRB sehingga selain dapat menambah jumlah sampel juga lebih mampu untuk dapat dilakukan generalisasi.

Hasil ini membuktikan bahwa PAD dan belanja modal tidak memiliki muatan informasi yang digunakan untuk menentukan PDRB. Jumlah daerah penelitian yang digunakan dalam penelitian ini hanya 9 pemerintah kabupaten/ kota di Provinsi Bali selama 5 tahun (2008-2012). Dengan demikian hubungan tidak langsung ini yang dituangkan dalam hipotesis keempat tidak mendapat dukungan empiris.

### **Simpulan dan Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal dan PDRB pada kabupaten/kota di Provinsi Bali, Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB pada kabupaten/kota di Provinsi Bali, PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB melalui Belanja Modal pada kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Kabupaten/Kota di Provinsi Bali seharusnya lebih menggali segala potensi-potensi yang ada guna mengoptimalkan kemampuan daerah di bidang keuangan, kemudian ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin agar peran pemerintah daerah menjadi lebih besar sehingga pendapatan asli daerah dapat meningkatkan pengaruh positif terhadap peningkatan PDRB dan belanja modal. Pemerintah daerah sebaiknya mengoptimalkan kualitas alokasi belanja modal sehingga dengan semakin baiknya alokasi belanja modal maka dapat mendorong keberhasilan pelaksanaan desentralisasi fiskal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal serta mampu memberikan efek positif terhadap PDRB. Optimalisasi belanja modal dapat dilakukan dengan meningkatkan Belanja publik yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum. Contoh belanja publik : pembangunan jembatan dan jalan raya, pembelian alat transportasi massa, dan pembelian mobil ambulans.

### **REFRENSI**

- Achmad, Sjaffii. 2009. Pengaruh Investasi Fisik Dan Investasi Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur 1990-2004. *Journal of Indonesian Applied Economics Vol. 3 No. 1 Mei 2009*, 59-76.
- Cooray, Arusha. 2009. Government expenditure, governance and economic growth. [www.palgrave-journals.com/ces/.51: 401-418](http://www.palgrave-journals.com/ces/.51: 401-418).
- Darwanto dan Yulia Yustikari. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar.

- Denni, Sulisty Mirza. 2012. Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Jawa Tengah Tahun 2006-2009. *Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang.*
- Dwirandra, A.A.N.B.. 2006. Efektivitas dan Kemandirian Keuangan Daerah Otonom Kabupaten/Kota di Proponsi Bali Tahun 2002-2006 (Skripsi). Universitas Udayana Bali.
- Firdaus, Anata. 2013. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, PDRB Perkapita, Jumlah Penduduk Dan Index Williamson Terhadap Tingkat Kriminalitas (Studi Pada 31 Provinsi Di Indonesia Tahun 2007-2012). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya.*
- Fitriyanti, Ismi Rizky dan Pratolo Suryo. 2009. Pengaruh pendapatan asli daerah. Dalam Penelitian Keuangan Akuntansi Sektor Publik II. Badan Litbang Departemen Dalam Negeri.
- Ikeji, Chibueze C. 2011. Politics of revenue of policy and strategic studies, 1(1), pp: 121-136.
- Inuwa, Nasiru. 2012. Government Expenditure and Economic Growth in Nigeria : Cointegration Analysis and Causality Testing. *Academic Research International.* Vol. 2, No. 3, 718-723.
- Liliana, Bunescu, Mihaiu Diana dan Comaniciu Carmen. 2011. Is There a Correlation between Government Expenditures, Population, Money Supply, and Government Revenues?. *International Journal of Arts & Sciences,* pp: 241-254.
- Lin, Justin Yifu dan Zhiqiang Liu. 2000. Fiscal decentralization and economic growth in china. *Economic development and cultural change.* Chicago. Vol. 49, pp: 263-275.
- Lukman, Harun dan Ghozali Maski. 2011. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah (Studi pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur). *Jurnal Ekonomi,* h: 1-17.
- Muhammad Nasir Dan Alfian Mufrody. 2010. Analisis Hubungan Pengeluaran Pemerintah Aceh Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Aceh. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* Vol. 1 No.2.
- Muharni. 2008. Pengaruh Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus, Dan Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Kabupaten/ Kota Di Provinsi Riau). *Skripsi.* Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Oates, Wallace E. 1993. Fiscal Decentralization and Economic Development. *National Tax Journal.* Vol. 46, no. 2, (June, 1993), pp. 237-43. Symposium on Fiscal Decentralization.
- Olatunji, O.C., O. Asaolu Taiwo dan J.O. Adewoye. 2009. A Review of Revenue Generation in Nigeria Local Government: A Case Study of Ekiti State. *Journal of International Business Management,* Vol.3, Issue 3, pp: 54-60.
- Puji Wibowo. 2008. Mencermati Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah. *Jurnal Keuangan Publik.* Vol.5, No. 1, hal: 55-83.
- Panji, I Putu Ngurah Kartika Jaya Dan Dwirandra, A.A.N.B. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 7.1 (2014):79-92.
- Setiyawati, Anis Dan Hamzah, Ardi . 2007. Analisis Pengaruh Pad, Dau, Dak, Dan Belanja pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Dan Pengangguran: Pendekatan Analisis Jalur. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia,* Vol.4, No. 2, Hal. 211-228.
- Silvia, Engla D., Yunia Wardi, dan Hasdi Aimon. 2013. Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Dan Inflasi Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi,* Januari 2013, Vol. I, No. 02. Padang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

- Sudewi, Ni Nyoman Ayu dan Wirathi, I.G.A.P. 2013. Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 2 [3] :135-141.
- Sufyeti. 2012. Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pembangunan di Kabupaten Agam. Dalam *Jurnal Kajian Ekonomi*. Vol.1, No. 1, hal: 165-186.
- Suyana Utama, Made. 2012. *Aplikasi Analisis Kuantitatif*. Denpasar: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Tuasikal, Askam. 2008. Pengaruh DAU, DAK, PAD dan PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, 1(2), h:142-155.
- Ulfi, Maryati Dan Endrawati. 2010. Politeknik Negeri Padang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Dana Alokasi Khusus (OAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Sumatera Barat. *Jurnal Akuntansi & Manajemen* Vol 5 No.2 Hal 68-84.
- Zouhaier, Hadhek. 2012. Institutions, Investment and Economic Growth. *International Journal of Economics and Finance*. Vol.4, No.2, 152-162.